

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa kita sebut dengan *Covid-19*, merupakan sebuah fenomena tidak terduga yang menjadi salah satu pandemi paling mengerikan yang pernah terjadi. Mulanya wabah ini muncul di Wuhan, Cina. Hingga kemudian wabah ini tersebar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam waktu yang relatif singkat. Berita tersebarnya wabah ini mulai muncul diakhir bulan Desember tahun 2019, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2020 wabah ini telah menimbulkan jutaan kasus dan ratusan ribu korban jiwa termasuk di Indonesia (Junaedi & Salistia, 2020). Semakin banyaknya kasus yang bermunculan, kejadian ini memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan agar virus tidak terus menerus tersebar. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran *Covid-19*, pemerintah mulai menerapkan karantina di beberapa kota di Indonesia. Bagi sebagian bahkan seluruh masyarakat, tentu saja akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kebijakan yang baru. Ketika karantina, kita diminta untuk tetap dirumah dan tidak bepergian kemana – mana, termasuk bekerja. Dengan demikian, pada saat itu banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencaharian juga pendapatannya.

Begitu pula dengan sistem pemerintahan kita. Pada saat pandemi, pemerintah dibuat kewalahan dengan adanya fenomena tersebut. Seperti yang disebutkan oleh UNICEF dalam lamannya, pengeluaran tahunan untuk program perlindungan sosial meningkat lebih dari dua kali lipat sebagai akibat dari tindakan cepat pemerintah

terhadap pandemi *Covid-19*. Dengan demikian, pengeluaran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, sejumlah besar anggaran pemerintah dialihkan untuk kebutuhan sosial pada saat itu. Namun, pemerintah daerah memiliki hak otonomi daerah yang mana pemerintah diberi kebebasan untuk mengatur serta menetapkan akan digunakan untuk apa anggaran pendapatan serta belanja mereka. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi dasar bagi setiap daerah untuk merencanakan, mengelola, menilai dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri (Habibi, dkk. 2021). Dengan demikian, pemerintah bebas mengatur anggaran yang telah ditetapkan daerahnya untuk kebutuhan daerah mereka masing – masing. Dengan adanya fenomena pandemi *Covid-19* tersebut, diperlukan adanya analisis terhadap kinerja keuangan yang dianggap mampu untuk mengetahui lebih dalam mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

Alvina (2018, dalam Sumastuti dkk, 2020) menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, kemampuan pendapatan dan sumber ekonomi, kondisi keuangan, kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya, dan keyakinan bahwa anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan

dapat digunakan untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi syarat atau tidak.

Sebelumnya, telah terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh Soraida (2022). Dalam penelitiannya, Soraida membandingkan Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah (PAD) dan Rasio Kemandirian untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kemandirian pemerintah kota Banjarmasin sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Selain itu, Pangastuti dan Wulan (2022) juga telah melakukan penelitian serupa dengan menggunakan analisis pertumbuhan, kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian belanja serta analisis ekonomi untuk membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Batu sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Sedangkan di lingkup Pemerintah Kota Semarang juga telah terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh Wibowo dan Nisfi (2022). Namun, dalam penelitiannya, hanya menggunakan 4 (empat) rasio keuangan daerah dan belum dilengkapi dengan uji statistik.

Dengan demikian, penelitian kali ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Semarang menggunakan perhitungan beberapa rasio keuangan dengan menambahkan Uji statistik untuk mengkaji lebih dalam terkait keabsahan hasil perhitungan rasio keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* jika dilihat dari Derajat Desentralisasi?
3. Apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* jika dilihat dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah?
4. Apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* jika dilihat dari Rasio Keserasian Keuangan Daerah?
5. Apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah?
6. Apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* jika dilihat dari Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* dengan mempertimbangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* dengan mempertimbangkan Derajat Desentralisasi.
3. Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* dengan mempertimbangkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah.
4. Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* dengan mempertimbangkan Rasio Keserasian Keuangan Daerah.
5. Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* dengan mempertimbangkan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah.
6. Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19* dengan mempertimbangkan Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menunjukkan teori fungsional perubahan sosial dalam konteks analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa/i terutama yang sedang menempuh pendidikan pada program studi Akuntansi Perpajakan untuk dijadikan sebagai acuan atau referensi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan keuangan sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pencapaian sasaran penulis, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19*, akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan yakni Bab I berisi pendahuluan tentang latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah yang mencakup masalah yang akan dipelajari, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta bagaimana sistematika penulisan penelitian itu dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang berisikan tinjauan pustaka, yang mencakup dasar – dasar dari penelitian yang akan dibuat, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Hipotesis ini memberikan gambaran tentang perkiraan hasil penelitian sementara. Setelah

itu dilanjutkan dengan Bab III menjelaskan metode penelitian, analisis data dan pengumpulan data dalam penelitian. Bab IV membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Terakhir yakni Bab V yang mencakup kesimpulan, keterbatasan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perubahan Sosial

Pada hakikatnya, masyarakat akan terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan perubahan – perubahan yang mungkin akan terjadi dalam hidupnya. Menurut Gillin dan Gillin (1954, dalam Marius 2006) Perubahan – perubahan yang dimaksud dapat berupa perubahan kondisi geografi, kebudayaan, perubahan lingkungan atau hal – hal baru dalam masyarakat yang dapat menjadi akibat dari perubahan sosial. Perubahan sosial ini dapat terjadi secara sadar dengan penuh perencanaan, namun juga dapat berlangsung secara tidak sadar yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari internal maupun eksternal individu tersebut. Soemardjan dan Davis (dalam Marius, 2006) mengatakan bahwa sistem sosial dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan struktur kelembagaan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Dalam hal ini, perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya dapat terjadi dengan ataupun tanpa direncanakan.

Menurut konsep struktur ekonomi Karl Max, lingkungan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat memengaruhi perilaku masyarakat. Ekonomi adalah inti dari perubahan sosial, seperti yang dinyatakan oleh Marx dalam Salim: “siapa yang menguasai ekonomi, akan juga menguasai aspek lainnya (Salim 2014:30).”

2.1.1 Teori Fungsionalisme

Menurut teori fungsionalisme, perubahan sosial terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Kehadirannya yang diluar prediksi, mengakibatkan perubahan sosial dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. William Ogburn mengatakan perubahan yang terjadi akibat perubahan sosial akan memberikan pengaruh yang berbeda – beda pada setiap elemen. Beberapa elemen akan mengalami perubahan dengan cepat dan adapula yang mengalami perubahan dengan lambat. Dalam penelitian ini, pandemi *Covid-19* dianggap sebagai suatu kejadian konstan yang dapat mengganggu keseimbangan elemen – elemen yang ada di tengah – tengah masyarakat. Talcott Parson (dalam Prayogo, 2022) mengatakan setidaknya ada keempat komponen penting dalam teori fungsional. Keempat komponen tersebut yaitu:

1. Adaptasi (*Adaption*)

Seluruh perubahan dalam suatu lingkungan mengalami perubahan karena faktor internal dan eksternal, masyarakat diharapkan dapat mampu untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan cepat agar keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terus berjalan.

2. Tujuan (*Goal*)

Sistem harus kemampuan untuk menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapainya. Selain itu, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

3. Integrasi (*Integration*)

Berbagai macam elemen yang ada di tengah – tengah masyarakat akan saling berkaitan. Oleh karena itu, masyarakat itu sendiri lah yang harus mengatur hubungan antara elemen – elemen tersebut agar tetap dapat terjaga keseimbangan setiap fungsinya.

4. *Latency*

Dalam suatu sistem sosial, jenis interaksi yang relatif tetap atau statis terus ada. Oleh karena itu, ketika perilaku menyimpang, perilaku dapat diatur melalui kesepakatan yang terus diperbarui.

Untuk menyempurnakan kebutuhan sistem dan struktur sosial dalam masyarakat, dibutuhkan empat kompoen yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, agar dapat terus bertahan empat komponen tersebut harus selalu ada di setiap sistem atau struktur sosial dalam masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini, pada saat terjadinya fenomena pandemi *Covid-19*, masyarakat dan seluruh lembaga kemasyarakatan harus dapat mempertahankan keempat komponen tersebut agar dapat terus bertahan ditengah perubahan sosial yang terjadi.

2.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah pada dasarnya telah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerah nya sendiri, dalam hal ini pemerintah diberikan hak otonomi daerah atas daerahnya. Demikian pula pada sistem keuangan pemerintah daerah yang secara mandiri akan diatur dan dikelola oleh pejabat keuangan yang berwenang dalam lingkup pemerintah

daerah. Namun, meski diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola, pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Dengan begitu, diperlukanlah adanya laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Kurrohman, 2013 (dalam Zami, A. 2020) menyatakan, laporan kinerja adalah cermin atau wajah dari pemerintah daerah. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan sebagai salah satu alat evaluasi apabila ditemukan adanya kejanggalan atau sesuatu yang tidak seperti seharusnya dalam keberjalanan pemerintah daerah.

Selain itu, Kawatu (2019:24) dalam bukunya juga menyebutkan bahwa analisis kinerja keuangan penting untuk memahami laporan keuangan, memahami angka dalam laporan keuangan, menilai laporan keuangan, dan menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Mengingat fakta bahwa sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memahami akuntansi secara general, analisis laporan kinerja keuangan diperlukan karena mereka harus membuat keputusan berdasarkan laporan kinerja keuangan pemerintah.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sebuah laporan terstruktur yang berisikan daftar transaksi-transaksi yang akan atau telah terjadi didalam lingkup pemerintahan. Kasmir (2016:7) juga menyatakan bahwa kondisi keuangan dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi hak – hak sektor publik

dan untuk bertanggung jawab atas penggunaan keuangan daerah untuk publik atau pihak lain yang diperlukan. Perencanaan dan penulisan laporan keuangan tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu, Hantono, dkk (2021:4) dalam bukunya menyebutkan bahwa laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan memiliki tujuan umum, yaitu:

1. Laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Mereka juga dapat berfungsi sebagai bukti bahwa pengelolaan laporan keuangan yang tepat dilakukan dengan benar.
2. Selain itu, laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi kinerja suatu entitas dalam jangka waktu tertentu.

Selain memiliki tujuan, laporan keuangan pemerintah daerah juga memiliki manfaat untuk para pemangku kepentingan publik sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Fitra (2019:8) juga menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah memiliki manfaat untuk:

1. Menunjukkan informasi penting mengenai kondisi kesehatan keuangan pemerintah dalam periode tertentu.
2. Laporan keuangan dapat bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintahan dan perubahan yang telah dan mungkin terjadi.
3. Laporan keuangan juga membantu melacak kinerja keuangan suatu entitas termasuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi peraturan perundang

- undangan, kontrak yang telah disetujui, dan ketentuan lain yang perlu dipenuhi.
- 4. Laporan keuangan juga sebagai acuan atau dasar untuk membuat perencanaan dan penganggaran taun – taun berikutnya.
- 5. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja organisasi dan manajemen.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menetapkan bahwa salah satu komponen laporan keuangan pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding selama periode tertentu. Fitra (2019:13) juga disebutkan bahwa dalam LRA akan mencakup sumber daya keuangan mana yang digunakan oleh pemerintah daerah, yang akan menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran akan memuat pendapatan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah, pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum daerah, transfer dana yang diterima atau digunakan oleh suatu entitas ke entitas pelaporan lain, dan pembiayaan untuk setiap penerimaan atau pengeluaran lainnya selama periode tertentu. Komponen – komponen bagian yang ada dalam LRA akan menjadi informasi penting untuk perhitungan analisis kinerja keuangan. Informasi yang dimaksud berupa data Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Perhitungan analisis kinerja keuangan inilah

yang nantinya akan membuktikan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

Fitra (2019:38) dalam bukunya menyebutkan terdapat beberapa hal yang akan tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah seluruh penerimaan dana yang diterima melalui kas umum daerah yang akan menambah saldo anggaran dan menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam bukunya, Fitra (2019:39) mengklasifikasikan pendapatan LRA berdasarkan jenis pendapatannya, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya, selain yang dianggap sah, akan ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai PAD.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni: Pendapatan yang ditransfer dari pemerintah pusat, seperti bagi hasil pajak, hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan pendapatan yang ditransfer dari pemerintah provinsi seperti hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan provinsi lainnya.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari rekening kas umum daerah selama periode anggaran

yang bersangkutan. Belanja biasanya baru diakui dalam laporan keuangan saat kegiatan tersebut dilakukan.

Belanja dalam laporan realisasi anggaran akan dikategorikan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga berdasarkan jenis dan kebutuhannya. Belanja operasi sendiri akan mencakup pengeluaran anggaran yang diperuntukkan kegiatan sehari – hari seperti membayar pegawai, barang, subsidi dan bantuan sosial. Sedangkan, yang dimaksud dengan belanja modal adalah belanja yang memiliki masa manfaat lebih lama daripada belanja operasi dan biasanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan dari organisasi atau entitas tersebut seperti belanja tanah, gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan.

Selain itu, ada belanja tak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran daerah untuk situasi darurat seperti bencana, keperluan mendesak, dan pengembalian atas kelebihan penerimaan dari tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.5 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio keuangan daerah dapat digunakan untuk mempertimbangkan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis ini diperlukan untuk dapat membandingkan kinerja keuangan pemerintah selama periode waktu tertentu dengan periode waktu yang berbeda. Jadi, akan jelas apakah kinerja keuangan pemerintah meningkatkan pencapaian atau justru menurunkan performa dalam

mencapai target. Peneliti memutuskan untuk menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, seperti:

1. Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah

Rasio kemandirian pemerintah daerah menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam bukunya, Halim (2007:232) mengatakan bahwa dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi ditambah dengan dana pinjaman yang diperoleh, perhitungan ini dapat menunjukkan seberapa mandiri keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan mereka.

2. Derajat Desentralisasi

Dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dalam suatu periode anggaran tertentu. Ini akan menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

Dengan membandingkan realisasi penerimaan daerah dengan target yang telah ditentukan, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah akan menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengelola penerimaan pendapatan daerah. Ini juga akan menunjukkan seberapa efisien pemerintah

dalam memungut pendapatan, dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan asli daerah.

4. Rasio Keserasian Keuangan Daerah

Untuk menunjukkan anggaran mana yang lebih diutamakan oleh pemerintah daerah, rasio keserasian akan digunakan. Halim (2007) setuju bahwa rasio keserasian akan menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan anggaran rutin atau, dalam hal ini, belanja operasional dan modal atau pembangunan. Menurut Wibowo dan Nasfi (2022), hasil perhitungan yang lebih kecil menunjukkan bahwa tingkat keserasian keuangan pemerintah daerah semakin baik jika persentase dana yang dialokasikan untuk keperluan operasional semakin kecil. Dengan membandingkan belanja rutin dan belanja modal dengan total anggaran yang telah ditentukan, Anda dapat melihat rasio keserasian.

5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Dengan membandingkan hasil pendapatan asli daerah tahun ini dikurangkan dengan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, rasio pertumbuhan keuangan daerah akan menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah pemerintah dari beberapa periode secara berturut-turut. Menurut Halim (2007:241) dalam bukunya, menghitung rasio pertumbuhan pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuan

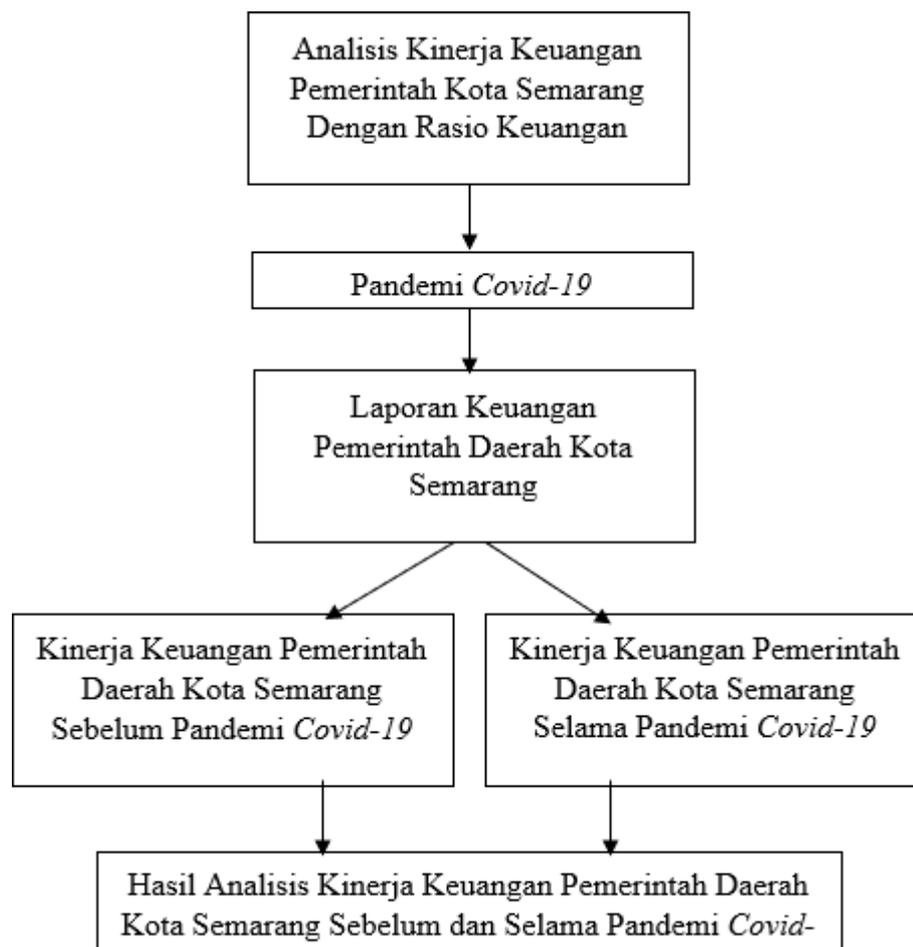
pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya.

6. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dengan membandingkan total belanja langsung dan pembangunan dengan total belanja daerah dalam suatu periode, kita dapat menentukan rasio belanja langsung dan tidak langsung untuk mengetahui seberapa sesuai pencapaian belanja pemerintah dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.7 Kerangka Pemikiran

Peneliti akan menganalisis laporan realisasi anggaran menggunakan rasio keuangan daerah yang telah ditetapkan. Ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah baik saat pandemi maupun sebelum pandemi. Oleh karena itu, peneliti membuat kerangka teoritis yang ditunjukkan pada gambar 2.1:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat didefinisikan sebagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh seorang peneliti. Penelitian sebelumnya dapat berasal dari berbagai sumber ilmu, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Soraida (2022)	Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Rasio Kemandirian 	<p>Hasil menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018, 2019 dan 2021 dianggap sangat efektif dan efektif. Namun, pada tahun 2020, karena kasus <i>Covid-19</i> yang meningkat yang berdampak pada ekonomi pemerintah Kota Banjarmasin, Rasio Efektifitas PAD menurun sebesar 73,98%. - Perekonomian pemerintah Kota Banjarmasin belfluktuasi, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan persentase

				kemandirian, menurut hasil analisis rasio kemandirian.
2.	Puspita dan Pangastuti (2022)	Pemerintah Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Pertumbuhan Pendapatan & Belanja - Rasio Kemandirian - Rasio Efektivitas - Rasio Efisiensi - Rasio Keserasian Belanja 	<p>Hasil menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan pendapatan pemerintah Kota Batu pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara rasio pertumbuhan belanja mengalami penghematan - Tingkat kemandirian pemerintah Kota Batu pada tahun 2019 dan 2020 masih didominasi oleh peran pemerintah pusat. - Tingkat efektivitas kinerja pendapatan daerah naik dari yang semula cukup efektif di tahun 2019 menjadi sangat efektif di tahun 2020. - Di tahun 2019 dan 2020, terjadi penurunan pendapatan yang signifikan, tetapi tingkat efisiensi masih dikategorikan sebagai efisien. - Di tahun 2019 dan 2020, tingkat keserasian belanja

				didominasi oleh belanja operasi, meskipun terjadi penurunan pada belanja modal, sementara kenaikan yang signifikan terjadi pada belanja tak terduga.
3.	Wibowo dan Nisfi (2022)	Pemerintah Daerah Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Derajat Otonomi Fiskal - Rasio Kemandirian - Rasio Efektivitas PAD - Rasio Efisiensi - Rasio Keserasian 	<p>Hasil menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk tahun 2018-2021, rasio derajat otonomi fiskal Pemerintah Daerah Kota Semarang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencari dan mengelola pendapatannya sendiri. - Untuk tahun 2018-2021, rasio kemandirian pemerintah daerah terus meningkat sebagai hasil dari peningkatan PAD pada tahun 2019-2021. - Rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kota Semarang cenderung berfluktuasi atau mengalami penurunan di tahun 2018-2020 dan naik dengan angka yang cukup baik

				<p>pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah dalam merealisasikan target PAD yang dianggarkan berada pada kelas interval efektif pada tahun 2018 dan tidak efektif pada 3 tahun selanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kota Semarang, ada penurunan dari tahun 2018 hingga 2021. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah tidak efisien untuk mendapatkan pendapatan. - Rasio keserasian antara belanja pemerintah daerah langsung dan tidak langsung sangat berubah-ubah berdasarkan perhitungan. Hasil perhitungan rasio keserasian yang menurun dari 2018 hingga 2021 menunjukkan hal tersebut.
4.	Muhammad Ichlasul Amal dan Puji Wibowo (2022)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	- Rasio Kemandirian	Hasil menunjukkan bahwa:

			<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah - Rasio Aktivitas - Rasio Pertumbuhan - <i>Debt Service Coverage Ration</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan atau bantuan pemerintah pusat telah meningkat sebagai akibat dari penanganan <i>Covid-19</i>. Hal tersebut dikarenakan pendapatan asli daerah berkurang. Pengurangan pendapatan yang disebabkan oleh penurunan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah. - Perhitungan rasio efektivitas keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019–2020 menunjukkan bahwa biaya pemungutan lebih besar dari pendapatan asli daerah, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pembagian pendapatan asli daerah memiliki kecenderungan efektif, - Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun anggaran 2019–2020 menunjukkan
--	--	--	---	---

				<p>bahwa biaya pemungutan lebih besar daripada pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pembagian PAD masih kurang efisien.</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk perhitungan belanja operasi sendiri turun dari tahun lalu. Sebagian dari dana belanja pegawai telah dialokasikan untuk penanganan <i>Covid-19</i>. Hal ini juga terjadi pada perhitungan realisasi belanja modal, yang mengalami penurunan karena anggaran belanja modal yang telah dialokasikan untuk penanganan <i>Covid-19</i>.- Perhitungan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa semua komponen pendapatan dan pengeluaran pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif kecuali komponen belanja
--	--	--	--	--

				<p>modal, tetapi pada tahun 2020 semua komponen mengalami pertumbuhan yang negatif.</p> <p>- Perhitungan rasio DSCR akan menjadi indikator terdapat pendapatan yang cukup untuk membayar hutangnya dimasa yang akan datang. Perhitungan ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 dan 2020 sangat baik.</p>
--	--	--	--	--

2.9 Hipotesis

2.9.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Rasio Kemandirian Sebelum Dan Selama Pandemi *Covid-19*.

Rasio kemandirian dapat digunakan untuk menentukan seberapa mandiri sebuah daerah dalam membiayai dirinya sendiri dengan pendapatan asli daerahnya. Analisis kemandirian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah untuk mendanai daerahnya sendiri dengan pendapatan asli daerahnya, menurut Kawatu (2019).

Tingkat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat berperan lebih sedikit di dalamnya. Sejalan dengan teori fungsional yang menjelaskan mengenai perubahan sosial yang terjadi secara konstan dapat mengakibatkan kacaunya suatu keseimbangan dalam masyarakat. Apabila suatu sistem dalam masyarakat telah terganggu keseimbangan atau kestabilannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan memberikan pengaruh pada perekonomian daerah pula. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan daerahnya agar dapat mempertahankan keseimbangan ditengah – tengah perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial konstan yang dimaksud berupa fenomena pandemi *Covid-19*. Dengan demikian, perubahan sosial berupa fenomena pandemi *Covid-19* ini memungkinkan terganggunya keseimbangan dalam pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga membutuhkan lebih banyak peran pemerintah pusat didalamnya.

Studi Puspita dan Pangastuti (2022) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Batu selama pandemi yakni di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 didominasi oleh peran pemerintah pusat. Dengan demikian, perubahan sosial akibat terjadinya pandemi *Covid-19* mengakibatkan pemerintah daerah kota Batu membutuhkan bantuan dana Pemerintah Pusat untuk mengelola dan membiayai daerahnya sendiri. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Soraida (2022) dimana perhitungan hasil rasio kemandirian pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan angka yang berfluktuasi, atau mengalami naik turun. Kondisi yang cenderung tidak stabil ini mengartikan kurang stabilnya juga

kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin pada saat itu. Perubahan sosial yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, mungkin merupakan salah satu penyebab kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin yang tidak stabil. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat Perbedaan Tingkat Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*.

2.9.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Derajat Desentralisasi Sebelum Dan Selama Pandemi *Covid-19*.

Kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi akan diukur dengan menentukan tingkat desentralisasi. Budiarto (2021) menyatakan bahwa derajat desentralisasi dapat digunakan untuk menentukan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah.

Menurut teori fungsional, perubahan sosial dapat terjadi dengan cepat atau lambat. Dalam penelitian ini, perubahan sosial akibat adanya pandemi *Covid-19* dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Namun kehidupan perekonomian ditengah – tengah masyarakat harus dapat terus berjalan. Sejalan dengan salah satu komponen penting dalam teori fungsional yang dikemukakan oleh Parson, yakni adaptasi yang artinya masyarakat harus dapat terus beradaptasi dengan berbagai perubahan kondisi yang terjadi. Begitu pula dengan kinerja keuangan di pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah diharap mampu dapat beradaptasi dengan cepat sehingga dapat mempertahankan kestabilan keuangan daerah agar tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Apabila pemerintah mampu menjaga keseimbangan keuangan daerahnya, tingkat desentralisasi suatu daerah

akan menunjukkan tingkat PAD atau Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah yang diterima oleh daerah tersebut. Hal tersebut menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil dalam suatu entitas pemerintahan.

Pemerintah Daerah Kota Semarang merupakan salah satu instansi yang dapat menjaga kestabilannya dari tahun ke tahun. Dalam penelitian sebelumnya oleh Wibowo dan Nisfi (2022) juga disebutkan bahwa rasio derajat otonomi fiskal Pemerintah Daerah Kota Semarang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun 2018–2021, pemerintah dapat mengelola pendapatan daerahnya dengan baik. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Pemerintah Kota Semarang Dapat Menjaga Kestabilan Pertumbuhan Derajat Desentralisasi Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*.

2.9.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Keuangan Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi *Covid-19*.

Perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah akan menunjukkan seberapa baik daerah mengelola penerimaan pendapatan daerahnya. Ini dilakukan dengan membandingkan penerimaan daerah dengan target. Perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, menurut Tumija dan Sinta (2022), akan menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mencapai target pendapatan asli daerah dan mencapai realisasi pendapatan asli daerah dengan jumlah realisasi pendapatan asli daerah itu sendiri.

Secara makro, teori fungsional struktural akan melihat perilaku manusia di dalam organisasi (masyarakat), dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi keseimbangan organisasi atau masyarakat (Nugroho, 2021). Berkaitan dengan penelitian ini, perubahan sosial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi keseimbangan masyarakat dan menyebabkan target penerimaan pendapatan daerah tidak tercapai.

Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, tingkat efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah dianggap sangat efektif, menurut penelitian Soraida (2022). Namun, pada tahun 2020, tingkat efektivitas ini mengalami penurunan yang signifikan karena tingginya kasus pandemi COVID-19, yang berdampak pada perekonomian pemerintah kota Banjarmasin. Studi serupa dilakukan oleh Wibowo dan Nisfi (2022) dan menemukan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kota Semarang berada dalam kategori yang cukup baik. Namun, perhitungan rasio efisiensi menurun secara signifikan. Dari 2018–2021, rasio efisiensi terus menurun. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Terdapat Perbedaan Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19..

2.9.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Rasio Keserasian Keuangan Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.

Menurut Halim (2007), rasio keserasian keuangan daerah akan menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk kebutuhan belanja operasional dan modal. Pemanfaatan dana atau anggaran daerah untuk

kebutuhan ini, khususnya belanja modal, dapat diketahui dengan melakukan perhitungan terhadap rasio keserasian keuangan daerah.

Salah satu komponen penting dalam teori fungsional yang disampaikan oleh Talcott Parson (dalam Prayogo, 2022) yakni komponen integrasi (*integration*) menyatakan bahwa komponen – komponen dalam suatu sistem yang saling berkaitan harus dapat terjaga dengan baik hubungannya agar masing – masing komponen dapat berfungsi secara maksimal. Berkaitan dengan penelitian ini, pemerintah daerah harus mampu mengatur hubungan antara komponen – komponen dalam kinerja keuangannya agar dapat berfungsi secara maksimal. Dalam hal lain, pemerintah daerah harus mampu mengatur alokasi dana untuk setiap komponen dengan tepat sesuai dengan kebutuhannya agar semua tetap dapat beroperasi secara optimal meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung.

Rasio belanja operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turun dari tahun anggaran 2019–2020, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Muhammad (2022). Salah satu alasannya dikarenakan sebagian dana belanja pegawai dialokasikan untuk penanganan *Covid-19*. Wibowo dan Muhammad (2022) menyatakan penyebab menurunnya realisasi anggaran pada belanja operasional terjadi penurunan karena dua faktor utama. Pertama, biaya barang turun pada output, terutama anggaran perjalanan dinas. Kedua, biaya barang turun pada layanan operasional. Kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan *Work From Home* selama pandemi *Covid-19*. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Ditemukan Perbedaan Pada Perhitungan Rasio Keserasian Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*.

2.9.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi *Covid-19*.

Dalam kasus ini, pemerintah daerah dapat mengetahui pertumbuhan kinerja keuangannya dengan menghitung rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangannya. Perhitungan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah akan baik jika dapat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Ini akan dilakukan dengan membandingkan hasil pendapatan asli daerah tahun berjalan dengan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya (Pangastuti dan Wulan, 2022).

Sejalan dengan teori fungsional yang mana perubahan sosial yang terjadi secara konstan atau tiba – tiba dapat mempengaruhi keseimbangan yang ada. Begitu pula dengan keseimbangan penerimaan pendapatan daerah. Pada saat pandemi *Covid-19* masih berlangsung, pertumbuhan perekonomian nasional dinyatakan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya aktivitas sosial yang mengakibatkan berkurangnya juga aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Studi yang dilakukan oleh Wibowo dan Muhammad pada tahun 2022 pada perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan negatif pada hampir semua komponen dalam laporan realisasi anggaran. Hal tersebut terjadi pada tahun 2020 dimana kasus pandemi *Covid-19* sedang tinggi sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan anggaran daerahnya dengan kondisi pandemi pada saat itu, sehingga target awal

APBD tidak tercapai, dan beberapa anggaran dialokasikan untuk penanganan pandemi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dalam penelitian ini ditemukan hipotesis yaitu:

H5: Terdapat Perbedaan Pada Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*.

2.9.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Rasio Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Sebelum Dan Selama Pandemi *Covid-19*.

Dengan membandingkan total belanja langsung dan pembangunan dengan total belanja daerah selama periode tertentu, perhitungan rasio belanja langsung dan tidak langsung akan menunjukkan apakah pencapaian belanja pemerintah telah sesuai dengan yang dianggarkan. Munandar dan Rizki (2021) mengatakan bahwa perhitungan rasio ini akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk memprioritaskan alokasi dana.

Tujuan (*Goal*) menjadi salah satu komponen penting dalam teori fungsional. Suatu sistem dalam entitas, harus dapat menentukan tujuan agar mengerti akan kemana entitas itu berjalan. Hal tersebut pasti diikuti dengan upaya entitas untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam suatu sistem pemerintahan, dana yang telah dianggarkan tentu harus dialokasikan sesuai dengan yang dianggarkan. Namun, dengan adanya perubahan sosial yang terjadi secara konstan berupa fenomena pandemi *Covid-19* ini dapat mempengaruhi berbagai elemen termasuk anggaran belanja yang telah ditetapkan pemerintah. Selama masa pandemi *Covid-19* hampir seluruh kegiatan diharuskan untuk berhenti sementara atau pada saat itu diberlakukannya sistem *lockdown*. Dengan demikian, hal tersebut tentu saja akan

memberikan dampak atau pengaruh terhadap pengeluaran belanja daerah. Anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan lain yang lebih penting pada saat itu. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dalam penelitian ini muncul hipotesis yaitu:

H6: Terdapat Perubahan Pada Alokasi Dana Belanja Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Semarang dengan menggunakan data yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Perhitungan rasio keuangan ini akan menjadi dasar untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Kebutuhan data yang akan dicari telah menentukan sumber dana yang akan digunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sejumlah rasio keuangan daerah. Ini termasuk rasio kemandirian, desentralisasi, efektivitas dan efisiensi, keserasian, pertumbuhan, dan rasio belanja langsung dan tidak langsung.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan daerah untuk membiayai seluruh pemerintahannya, termasuk pembangunan dan pelayanan masyarakat secara mandiri, akan ditunjukkan oleh perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah. Secara mandiri disini memiliki artian bahwa pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan daerahnya dengan atau tanpa bantuan dari sumber dana eksternal. Halim (2007, dalam Fathah, 2013) menyebutkan bahwa beberapa komponen sumber dana eksternal, yang juga dikenal sebagai pendapatan transfer, termasuk hasil pajak, hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan khusus,

dana darurat, dan pinjaman. Oleh karena itu, rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa mandiri kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan kinerja keuangannya, dapat dilakukan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah. Tolak ukur untuk menghitung rasio ini akan dijelaskan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007, dalam Budianto A. 2021)

- Pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa tingkat kemandirian berkisar antara 0 dan 25%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peran yang paling dominan dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah dianggap kurang mampu membiayai pemerintahannya secara mandiri.
- Pola hubungan konsultatif akan ditunjukkan dengan tingkat kemandirian 25% - 50%, dianggap bahwa peran pemerintah pusat telah berkurang

karena pemerintah daerah mulai memiliki kemampuan untuk menjalankan otonomi sendiri.

- Pola hubungan partisipatif akan ditunjukkan dengan tingkat kemandirian berada di angka 50% - 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih mampu menjalankan otonomi sendiri, yang berarti peran pemerintah pusat telah berkurang.
- Pola hubungan delegatif 75 persen hingga 100 persen menunjukkan bahwa pemerintah pusat sudah tidak lagi mengganggu urusan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan otonomi mereka sendiri.

Dari tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap sumber pendapatan transfer atau pendapatan eksternal akan semakin tinggi jika hasil menunjukkan angka yang tinggi pula. Sebaliknya, tingkat kemandirian pemerintah daerah berkorelasi negatif dengan tingkat kemandirian pemerintah pusat dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah.

Fathah (2013) juga menyatakan bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pembayaran pajak daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dianggap mampu.

2. Derajat Desentralisasi

Kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi akan diukur dengan perhitungan derajat desentralisasi, yang dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan atau pendapatan daerah. Oleh karena itu, derajat desentralisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah akan ditunjukkan melalui perhitungan derajat desentralisasi (Budianto, 2021). Dengan menggunakan perhitungan derajat desentralisasi, peneliti akan menyelidiki apakah ada perbedaan dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19*.

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan. Menurut Mahmudi (2010, dalam Fathah, 2013), adalah mungkin untuk menghitung rasio efektivitas pendapatan asli daerah dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran pendapatan asli daerah atau target pendapatan asli daerah. Untuk mengetahuinya, rasio efektivitas keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tolak ukur pengukuran rasio efektivitas keuangan daerah akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Abdul Halim (2007, dalam Budianto A. 2021)

Selain itu, untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah, kinerja pemungutan pendapatan pemerintah akan ditunjukkan. Fathah, RN (2013) mengatakan bahwa untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima, dapat dilakukan perhitungan rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai apakah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemungutan pendapatan dilakukan dengan efisien dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel berikut menunjukkan tolak ukur untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah:

Tabel 3. 3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007, dalam Budianto A. 2021)

4. Rasio Keserasian Keuangan Daerah

Melakukan perhitungan rasio keserasian terhadap kinerja keuangan daerah dapat membantu menentukan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk belanja rutin dan pembangunan yang optimal. Untuk melakukan perhitungan ini, rasio belanja operasi dan rasio belanja modal akan diperhitungkan, dan rumus untuk menghitung rasio keserasian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

dan

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio belanja operasi akan memperhitungkan biaya – biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional. Belanja seperti biaya pegawai, barang dan jasa seperti biaya listrik, dan kebutuhan kantor lainnya dianggap sebagai belanja operasi sendiri jika masa manfaatnya kurang atau sama dengan satu tahun anggaran. Namun, perhitungan rasio belanja modal digunakan untuk menentukan berapa banyak dana daerah yang dialokasikan untuk investasi melalui belanja modal pada tahun anggaran tersebut.

Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam alokasi belanja daerah untuk belanja modal dan operasi. Mereka akan melakukan ini dengan menghitung rasio belanja modal dan operasi pada Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi Covid-19.

5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan kinerja keuangan suatu negara. Menurut Budianto (2021), ada cara untuk menghitung rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan mereka dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk menghitung rasio pertumbuhan ini, dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - 1}$$

X_n = Tahun Berjalan

$X_n - 1$ = Tahun Sebelumnya

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan melihat bagaimana pendapatan asli daerah tahun berjalan dikurangi dari pendapatan asli daerah tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peneliti dapat mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Semarang berhasil mempertahankan pertumbuhan dan peningkatan pendapatan asli daerahnya sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

6. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Apakah sesuai dengan anggaran, rasio belanja langsung dan tidak langsung akan menunjukkan hasil belanja pemerintah daerah. Perhitungan ini akan membandingkan total belanja langsung dan tidak langsung dengan total belanja daerah dalam suatu periode.

Belanja langsung sendiri adalah belanja yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan atau aktivitas operasional pemerintah daerah. Belanja tidak langsung, di sisi lain, adalah belanja yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan atau aktivitas operasional pemerintah daerah. Untuk mengetahui seberapa efektif pemerintah daerah menggunakan anggaran, perhitungan rasio belanja langsung dan tidak langsung akan dikaitkan dengan anggaran total daerah. Untuk melakukan perhitungan ini, rumus berikut dapat digunakan:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

dan

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan anggaran belanja daerah untuk belanja langsung dan tidak langsung sebelum dan selama pandemi COVID-19, peneliti menggunakan perhitungan rasio belanja langsung dan tidak langsung.

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Pemerintah Kota Semarang sebagai objek dalam penelitian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui perantara. Dengan kata lain, data sekunder diperoleh melalui situs web resmi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2018-2021.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan untuk mendukung analisis penelitian, penulis menggunakan metode berikut:

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati data utama dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2018-2021, yang akan digunakan untuk melakukan analisis terkait permasalahan yang ingin ditangani oleh penulis. Peneliti menggunakan

metode observasi untuk mengamati dokumen, catatan, dan laporan, serta setiap elemen yang terkait dengan masalah yang ditangani.

2. Penelitian Kepustakaan

Peneliti mendapatkan dasar dari masalah yang diteliti melalui metode kepustakaan, yang melibatkan membaca tulisan ilmiah dan literatur dari berbagai sumber untuk mendukung penelitian.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data digunakan untuk mengevaluasi hasil pengolahan data, yang dilakukan dengan metode kualitatif yang didukung oleh uji statistik. Metode kualitatif akan menggunakan rumus – rumus rasio analisis kinerja keuangan daerah secara vertikal dari beberapa tahun periode keuangan secara berurutan, serta membandingkannya dari tahun ke tahun untuk data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Semarang. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan kenaikan atau penurunan setiap rasionya pada tahun anggaran yang diteliti yakni tahun 2018 – 2021.

Hasil perhitungan rasio keuangan juga didukung oleh perhitungan Uji Sampel Independen T-Test. Pengujian ini dapat digunakan untuk menentukan apakah ada kesamaan atau perbedaan antara dua kelompok yang tidak berhubungan satu sama lain. Berkaitan dengan penelitian ini, Uji Sampel Independen T-Test bertujuan untuk menguji validitas temuan penelitian dan menentukan apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil perhitungan kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sesuatu untuk diteliti lebih dalam berkaitan dengan kasus yang akan diangkat dalam penelitian. Sugiyono (2019:55) mengatakan bahwa segala sesuatu yang peneliti tentukan untuk dipelajari lebih lanjut hingga diperoleh suatu informasi yang baru maka itu disebut sebagai objek penelitian. Menurut Husein Umar (2013:18), ada pendapat lain bahwa objek penelitian juga akan memberikan informasi tentang subjek dan lokasi penelitian. Pemerintah Kota Semarang adalah subjek penelitian ini, sejalan dengan pendapat para ahli. Data yang digunakan untuk Pemerintah Kota Semarang adalah Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2018–2021. Data tersebut peneliti peroleh melalui situs resmi PPID atau Pusat Pelayanan Informasi Daerah Kota Semarang.

4.2 Hasil Analisis Data

Hasil penelitian terdiri dari analisis data menggunakan beberapa rasio keuangan daerah berikut:

4.2.1 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Semarang:

Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Semarang

Tahun Anggaran 2018 - 2021

RASIO KEMANDIRIAN					
No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Pinjaman	Hasil
1	2018	Rp. 1.821.274.103.250	Rp. 4.234.394.060.362	Rp. 25.000.000.000	43%
2	2019	Rp 2.066.333.418.588	Rp. 4.565.340.827.417	Rp. 34.773.400.000	46%
3	2020	Rp 2.024.537.808.307	Rp. 4.400.500.838.480	Rp. 46.093.127.349	46%
4	2021	Rp 2.385.948.066.862	Rp. 4.822.890.590.122	Rp. 0	49%

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Kota Semarang, yang berada di antara 43% dan 49%. Hal tersebut ditunjukkan dengan kestabilan hasil persentase yang cenderung sedikit meningkat, meskipun pendapatan asli daerah turun sedikit dari 2,066 juta di 2019 menjadi 2,024 juta di 2020. Seperti yang kita ketahui, pajak daerah dan retribusi berasal dari pajak hotel, restoran, kendaraan bermotor, dan parkir, antara lain, dan PAD lainnya. Penurunan pendapatan asli daerah di tahun 2020 antara lain disebabkan oleh penurunan pendapatan pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di sisi lain, kasus COVID-19 yang sangat tinggi pada tahun 2020 membuat Kota Semarang menjadi salah satu kota yang menerapkan karantina atau tetap di rumah untuk beberapa saat. Dengan demikian, kegiatan yang berada diluar rumah termasuk menginap di hotel, makan di restoran, parkir, dan mengunjungi tempat – tempat hiburan juga ditiadakan. sehingga mengurangi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah.

Meskipun demikian, pemerintah kota Semarang meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari 2,024 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 2,385 juta rupiah pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Kota Semarang berada di interval yang cukup stabil dan kemungkinan besar akan meningkat di masa mendatang. Selain itu, perhitungan ini menunjukkan bahwa pola hubungan konsultatif menggambarkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Semarang dalam membiayai daerahnya sendiri. Pola ini menjelaskan bahwa meskipun kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang masih cukup rendah, namun Pemerintah Kota Semarang sudah mampu membiayai daerahnya sendiri, yang berarti bahwa peran pemerintah pusat mulai berkurang. Didasarkan pada studi sebelumnya oleh Wibowo dan Nisfi (2022) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Semarang meningkat dan cenderung stabil dari 2018 hingga 2021. Oleh karena itu, peran Pemerintah Pusat dalam kinerja keuangan Kota Semarang tidak terlalu dominan. Hasil perhitungan rasio kemandirian juga didukung oleh hasil Uji Sampel Independen T-Test, yang menunjukkan hasil Sig. (2-tailed) 0,192 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa, berdasarkan tingkat kemandirian, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebagai akibat dari perubahan sosial pandemi *Covid-19*.

4.2.2 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 4.2 berikut menunjukkan hasil perhitungan derajat desentralisasi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Semarang:

*Tabel 4. 2 Perhitungan Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2018 - 2021*

DERAJAT DESENTRALISASI				
No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Hasil
1	2018	Rp. 1.821.274.103.250	Rp. 4.234.394.060.362	43%
2	2019	Rp 2.066.333.418.588	Rp. 4.565.340.827.417	45%
3	2020	Rp. 2.024.537.808.307	Rp. 4.400.500.838.480	46%
4	2021	Rp 2.385.948.066.862	Rp. 4.822.890.590.122	49%

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Tabel 4.2 menunjukkan perhitungan derajat desentralisasi yang menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Pemerintah Kota Semarang. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa hasilnya terus meningkat. Namun demikian, terlihat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020 bersamaan dengan penurunan pendapatan daerah secara keseluruhan dari tahun sebelumnya. Meski demikian, hasil perhitungan derajat desentralisasi menunjukkan persentase yang terus meningkat. Selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase derajat desentralisasi justru malah mengalami kenaikan dari 45% ke 46%. Hasil

perhitungan ini juga didukung oleh hasil Uji Sampel Independen T-Test yang menunjukkan hasil Sig. (2-tailed) $0,192 > 0,05$ yang artinya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* tidak berdampak signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang.

4.2.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah pada Pemerintah Kota Semarang:

*Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2018 - 2021*

RASIO EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH				
RASIO EFEKTIVITAS				
No.	Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Hasil
1	2018	Rp 1.821.274.103.250	Rp 1.811.352.288.800	101%
2	2019	Rp 2.066.333.418.588	Rp 2.128.176.142.000	97%
3	2020	Rp 2.024.537.808.307	Rp 1.889.598.813.000	107%
4	2021	Rp 2.385.948.066.862	Rp 2.607.693.085.682	91%

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola pendapatan daerah dengan realisasi pendapatan mengalami variasi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan rasio efektivitas yang ditunjukkan pada tabel 4.3. Hal ini ditunjukkan dengan persentase yang turun dari tahun anggaran 2019 hingga

2021. Pemerintah Kota Semarang dianggap sangat efektif pada tahun 2018 dengan persentase di atas 100%, atau 101%.

Kemudian pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan persentase dengan nilai 97% namun masih dalam kriteria efektif. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Semarang kembali mengalami peningkatan nilai persentase dengan nilai 107%, Ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dari jumlah yang dianggarkan, yang menunjukkan bahwa pemerintah kota Semarang memobilisasi pendapatan asli daerah dengan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan persentase efektivitas sebesar 91%. Dilihat dari realisasi dan anggaran pendapatan daerah tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2021 berani menganggarkan nilai yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun nilai realisasi pendapatannya tidak mampu mencapai nilai tersebut. Sehingga tingkat efektivitas Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola pendapatan daerahnya belum sesuai dengan yang ditargetkan dan berada pada kriteria cukup efektif. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kasus pandemi *Covid-19* yang menyebabkan belum sempurnanya kegiatan perekonomian di masyarakat sehingga mempengaruhi realisasi pendapatan daerah di tahun tersebut.

Meski demikian, Pemerintah Kota Semarang tetap berada di kriteria yang efektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Nisfi (2022) yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah

Kota Semarang dari 2018 hingga 2020 menurun, dan naik dengan angka yang cukup baik pada tahun 2021. Hasil perhitungan ini juga didukung oleh hasil Uji Sampel Independen T-Test yang menunjukkan hasil Sig. (2-tailed) $1 > 0,05$ yang memiliki arti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19.

Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Semarang

Tahun Anggaran 2018 - 2021

RASIO EFISIENSI KEUANGAN DAERAH				
RASIO EFISIENSI				
No.	Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Hasil
1	2018	Rp4.505.278.014.058	Rp 4.234.394.060.362	106%
2	2019	Rp4.631.708.145.219	Rp 4.565.340.827.417	101%
3	2020	Rp3.936.225.941.899	Rp 4.400.500.838.480	89%
4	2021	Rp4.735.661.890.892	Rp 4.822.890.590.122	98%

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Pada **tabel 4.4** menunjukkan bahwa perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang yang terus mengalami penurunan persentase dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kota Semarang dinilai tidak efisien dengan persentase diatas 100% yakni 106% dan 101%. Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan persentase dengan nilai 89% sehingga termasuk dalam kriteria cukup efisien. Di tahun 2021,

pemerintah Kota Semarang kembali mengalami peningkatan hasil perhitungan dengan persentase 98% yang mana dinilai masuk dalam kriteria kurang efisien. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang masih kurang efisien dalam mengelola biaya untuk memperoleh pendapatan dan mencapai pendapatan yang diharapkan. Sejalan dengan studi oleh Wibowo dan Nisfi (2022) yang menyatakan bahwa perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak efisien dalam memanfaatkan belanja daerah untuk memperoleh pendapatan.

Selama kurun waktu tersebut, tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang terus mengalami penurunan. Ada kemungkinan bahwa perubahan sosial yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* tidak menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan dalam tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang. Kesimpulan ini didukung oleh hasil Uji Sampel Independen T-Test, yang menunjukkan hasil Sig. (2-tailed) 0,192 lebih besar dari 0,05.

4.2.4 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Keuangan Daerah

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio keserasian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Semarang:

Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Keserasian Terhadap Belanja Operasional

Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 - 2021

RASIO KESERASIAN				
RASIO BELANJA OPERASI				
No.	Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Hasil
1	2018	Rp3.276.818.579.788	Rp4.505.278.014.058	73%
2	2019	Rp3.576.946.715.447	Rp4.631.708.145.219	77%
3	2020	Rp3.429.805.611.104	Rp3.936.225.941.899	87%
4	2021	Rp3.781.992.043.191	Rp4.735.661.890.892	80%

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Antara tahun 2018 dan 2020, hasil perhitungan rasio keserasian terhadap belanja operasional, yang disajikan dalam tabel 4.5, menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam hasil perhitungan dengan membandingkan belanja operasi dengan total belanja daerah Kota Semarang. Ini menunjukkan bahwa semakin besar presentase yang dihasilkan, semakin banyak dana yang dialokasikan untuk belanja operasi atau rutin. Pada tahun 2021, perhitungan rasio keserasian pada Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan dari semula 87% di tahun 2020 menurun menjadi 80% ditahun 2021. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat pengurangan penggunaan dana daerah untuk keperluan belanja operasional seperti belanja pegawai, Berkaitan dengan

terjadinya pandemi *Covid-19* pada saat itu yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan harus dihentikan, termasuk kegiatan bekerja di kantor. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk keperluan operasional pasti akan mengalami penurunan sehingga muncul hasil perhitungan yang menurun dari tahun sebelumnya.

*Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Keserasian Terhadap Belanja Modal
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 - 2021*

RASIO KESERASIAN				
RASIO BELANJA MODAL				
No	Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Hasil
1	2018	Rp 1.228.459.434.270	Rp 4.505.423.372.044	27%
2	2019	Rp 1.054.761.429.772	Rp 4.632.756.551.348	23%
3	2020	Rp 506.420.330.795	Rp 4.126.379.066.760	12%
4	2021	Rp 953.669.847.701	Rp 4.764.050.791.156	20%

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan dalam tabel 4.6, perhitungan rasio keserasian yang berkaitan dengan belanja modal memiliki tujuan dan maksud yang hampir sama dengan perhitungan rasio keserasian belanja operasi, yang akan membandingkan porsi belanja daerah yang akan dialokasikan untuk belanja modal. ditemukan bahwa terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2018 dengan persentase 27%, kemudian tahun 2019 menurun dengan persentase 23%, dan di tahun 2020 yang semakin menurun dengan persentase 12%. Pada tahun 2021 kembali meningkat

dengan persentase sebesar 20%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa, baik sebelum maupun selama pandemi COVID-19, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dialokasikan untuk kebutuhan operasi, sehingga perhitungan rasio belanja modal menunjukkan hasil relatif lebih kecil. Namun, penurunan dan peningkatan rasio belanja modal akan bergantung pada kegiatan pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan. Berkaitan dengan terjadinya pandemi *Covid-19*, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Semarang terlihat lebih memprioritaskan pengeluaran dana daerah nya untuk kebutuhan belanja operasional.

Meskipun kegiatan perkantoran pada tahun tersebut tidak berjalan secara normal, kebutuhan belanja operasional lebih penting daripada belanja modal. Namun, perhitungan rasio belanja modal di tahun 2021 meningkat dari 12% pada tahun sebelumnya menjadi 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang mulai kembali memperhatikan belanja modal yang diperlukan untuk kebutuhan pembangunan dan investasi yang mungkin sudah tertinggal selama 2 tahun sebelumnya.

Untuk perhitungan tingkat keserasian terhadap belanja operasional dan belanja modal, hasil Uji Sampel Independen T-Test kedua menunjukkan hasil Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, yaitu 0,169 dan 0,182. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang. Karena meskipun terdapat penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2020, namun kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang dapat kembali meningkat di tahun 2021.

Sehingga secara menyeluruh tidak terdapat perbedaan tingkat keserasian kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi Covid-19.

4.2.5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Tabel 4.6 berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Semarang:

*Tabel 4. 7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2018 - 2021*

RASIO PERTUMBUHAN					
No.	Tahun	Total Pendapatan Tahun Ini	Total Pendapatan Tahun Sebelumnya	Hasil	
1	2018	Rp 4.234.394.060.362	Rp 3.964.574.307.584	7%	
2	2019	Rp 4.565.340.827.417	Rp 4.234.394.060.362	8%	
3	2020	Rp 4.400.500.838.480	Rp 4.565.340.827.417	-4%	
4	2021	Rp 4.822.890.590.122	Rp 4.400.500.838.480	10%	

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang telah meningkat dari 7 persen pada 2018 menjadi 8 persen pada 2019, tetapi turun 4 persen pada 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, ditahun 2020 kasus pandemi *Covid-19* sedang tinggi sehingga seluruh kegiatan dihentikan untuk sementara termasuk kegiatan perekonomian di seluruh daerah di Kota Semarang. Hal ini jelas berdampak besar pada ekonomi Pemerintah Kota Semarang. Seperti

yang terlihat di perhitungan rasio keuangan sebelumnya, sebagian besar hasil perhitungan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan di tahun 2020.

Dapat diartikan bahwa memang di tahun tersebut, Pemerintah Kota Semarang cukup terpengaruh dengan adanya pandemi *Covid-19* sehingga secara keseluruhan justru terdapat penurunan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun berikutnya pada tahun 2021, mulai diberlakukan sistem *new normal* atau kita harus dapat beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan pandemi *Covid-19*. Begitu pula Pemerintah Kota Semarang yang juga harus mampu beradaptasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan yang mengalami peningkatan persentase dari semula -4% menjadi 10%, dengan demikian Pemerintah Kota Semarang telah mampu kembali pulih atau mulai membaik dalam segi perekonomiannya.

Didukung oleh hasil Uji Sampel Independen T-Test, yang menunjukkan hasil Sig. (2-tailed) 0,587 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2018 hingga 2021. Meskipun penurunan terjadi di tahun 2020, pertumbuhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang dapat dipertahankan di tahun 2021.

4.2.6 Hasil Perhitungan Rasio Belanja Langsung Dan Tidak Langsung

Tabel 4.8 berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio belanja langsung dan tidak langsung pada Pemerintah Kota Semarang:

*Tabel 4. 8 Perhitungan Rasio Belanja Langsung Dan Tidak Langsung
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 - 2021*

RASIO BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG				
RASIO BELANJA LANGSUNG				
No.	Tahun	Belanja Langsung	Belanja Daerah	Hasil
1	2018	Rp4.409.327.708.581	Rp 4.505.423.372.044	98%
2	2019	Rp4.560.594.263.543	Rp 4.632.756.551.348	98%
3	2020	Rp3.767.249.681.699	Rp 4.126.379.066.760	91%
4	2021	Rp4.645.442.665.523	Rp 4.764.050.791.156	98%
RASIO BELANJA TIDAK LANGSUNG				
No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Daerah	Hasil
1	2018	Rp97.079.921.163	Rp 4.505.423.372.044	2%
2	2019	Rp73.304.077.430	Rp 4.632.756.551.348	2%
3	2020	Rp361.662.864.061	Rp 4.126.379.066.760	9%
4	2021	Rp118.608.125.633	Rp 4.764.050.791.156	2%

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Ditunjukkan dalam tabel 4.8, hasil perhitungan menunjukkan perbedaan hasil yang cukup signifikan antara dahap belanja langsung dan tidak langsung. Sangat jelas bahwa dalam perhitungan di atas, belanja langsung lebih dominan daripada belanja tidak langsung. Belanja yang memiliki hubungan langsung dengan operasi

pemerintah daerah disebut belanja langsung sendiri. Belanja yang tidak memiliki hubungan langsung dengan operasi pemerintah daerah disebut belanja tidak langsung.

Dalam perhitungan tahun anggaran 2018–2021, dapat kita lihat bahwa hasilnya relatif stabil. Hanya ada penurunan pada hasil persentase rasio belanja langsung karena total belanja langsung menurun, dan peningkatan pada hasil persentase rasio belanja tidak langsung karena total belanja langsung meningkat. Pemerintah Daerah mengeluarkan dana belanja tidak langsungnya untuk keperluan sosial yang lebih besar sebagai akibat dari pandemi *Covid-19*, karena tahun 2020 memiliki jumlah kasus *Covid-19* tertinggi. Ini karena belanja tidak langsung adalah dana yang digunakan untuk keperluan di luar operasional pemerintah daerah.

Hasil Uji Sampel Independen T-Test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung dari tahun 2018 hingga 2021 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Hasil Uji Sampel Independen menunjukkan hasil Sig. (2-tailed) 0,423 lebih besar dari 0,05.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut penjelasan dan analisis yang telah dilakukan mengenai perhitungan rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi covid-19, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19. Meskipun terdapat penurunan hasil perhitungan di beberapa rasio pada tahun pertama terjadinya pandemi *Covid-19* yakni di tahun 2020, Pemerintah Kota Semarang tetap dapat meningkatkan kembali kinerja keuangannya di tahun 2021. Dengan demikian, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Semarang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial konstan berupa pandemi *Covid-19* sehingga kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang cenderung stabil.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan, yang dapat memengaruhi hasilnya. Keterbatasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada empat tahun anggaran yakni dua tahun sebelum pandemi *Covid-19* yaitu 2018 hingga 2019, dan dua tahun selama pandemi, yaitu 2020 hingga 2021. Mengingat bahwa sampai dengan tahun 2022 pun

sebenarnya kasus *Covid-19* masih ada walaupun sudah sangat menurun jumlahnya, sehingga sebenarnya masih dapat dikatakan sebagai periode selama pandemi *Covid-19*.

2. Tingkat kemandirian, derajat desentralisasi, efektivitas dan efisiensi, tingkat pertumbuhan, keserasian antara belanja operasional dan modal, dan tingkat kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung adalah semua variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Mengingat sebenarnya masih banyak faktor lain yang mungkin juga terpengaruh akibat Pandemi *Covid-19*.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang agar dapat terus melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya.
2. Pemerintah Kota Semarang juga perlu terus meningkatkan kinerja aparatur daerah agar lebih cakap dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah agar dapat tercapai kinerja keuangan daerah yang efisien.
3. Pemerintah Kota Semarang terus memprioritaskan belanja operasional daripada belanja modal, sehingga keserasian penggunaan dana daerah untuk belanja operasional dan belanja modal tidak seimbang. Namun kembali lagi, hal tersebut agar dapat diperhatikan supaya dana daerah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
4. Pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Semarang yang cukup stabil namun mengalami penurunan di tahun awal mulanya pandemi, dan kembali pulih ditahun berikutnya menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota

Semarang dalam mempertahankan kinerja keuangan daerahnya. Sehingga Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu untuk mempertahankan pertumbuhan keuangan daerahnya di tahun – tahun berikutnya.

5. Diharapkan bahwa pemerintah kota Semarang dapat mengalokasikan dana daerahnya dengan tepat untuk belanja langsung dan tidak langsung. Supaya meski dalam perhitungan belanja langsung mengalami penurunan, apabila penggunaan dana dialihkan dengan tepat maka itu tidak akan menimbulkan masalah selama keperluan aspek – aspek terkait sudah terpenuhi.
6. Selanjutnya, penelitian ini membantu mengembangkan penelitian tentang dampak *Covid-19* terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang. Dengan menganalisis kinerja keuangan daerah, penelitian berikutnya dapat menambahkan pertumbuhan ekonomi makro dalam lingkup yang lebih luas, seperti kinerja keuangan beberapa kota di Jawa Tengah untuk dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang